



LAPORAN TAHUNAN

PPID PELAKSANA UPT
POLTRADA BALI
TAHUN 2023



<http://www.poltradabali.ac.id>

Latar Belakang



Dalam rangka reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Perhubungan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Perhubungan.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Perhubungan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Kementerian Perhubungan Khusus Politeknik Transportasi Darat Bali agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Politeknik Transportasi Darat Bali.

Maksud & Tujuan

Tujuan

Meningkatkan pengelolaan dalam rangka clean governance dan good governance dan pelayanan informasi di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali (Poltrada) Bali guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan hubungan dengan masyarakat atas keterbukaan informasi publik.

Maksud

- Mewujudkan pelayanan pengaduan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai komitmen perwujudan demokrasi
- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Politeknik Transportasi (Poltrada) Bali sehingga dapat mewujudkan citra positif
- Memberdayakan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab menjaga fasilitas prasarana dan sarana transportasi

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republic Nomor 4846)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali.

Ruang Lingkup

Kegiatan pelayanan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat diselenggarakan setiap hari kerja di Politeknik Transportasi Darat Bali



Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat :

1. Tersedianya informasi yang diminta oleh publik;
2. Tersedianya media komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media;
3. Terselenggaranya pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat yang akuntabel, efektif dan sesuai dengan standar pelayanan;
4. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan edukatif.

Struktur Organisasi



PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
3. meningkatkan sumberdaya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
4. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja dilingkup kerja Eselon III dalam melaksanakan pelayanan Informasi.



STRUKTUR ORGANISASI PPID

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI



PPID PELAKSANA UPT POLTRADA BALI

Manajer Informasi dan Dokumentasi

- Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi Ketatausahaan

Pengelola Dokumentasi

- Pejabat Struktural/Petugas yang membidangi Kehumasan/Ketatausahaan/Data/Program

Petugas Informasi

- Pegawai yang menangani bidang Kehumasan/Ketatausahaan/Data/Program di Unit Kerja

Sarana Prasarana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Poltrada Bali, dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- Melalui dashboard ppid Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui website poltradabali.ac.id atau melalui email dengan alamat : ppid@poltradabali.ac.id ;
- Melalui Telepon Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon (0361) 298 734 ;
- Melalui Jasa Pos Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltrada Bali ;
- Melalui WhatsApp Silakan chat WhatsApp nomor 08112011151
- Langsung Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat
Kampus 1 : Jl. Batuyang 109x Batubulan, Gianyar – Bali
Kampus 2 : Jl. Cempaka Putih, Desa Samsam, Tabanan

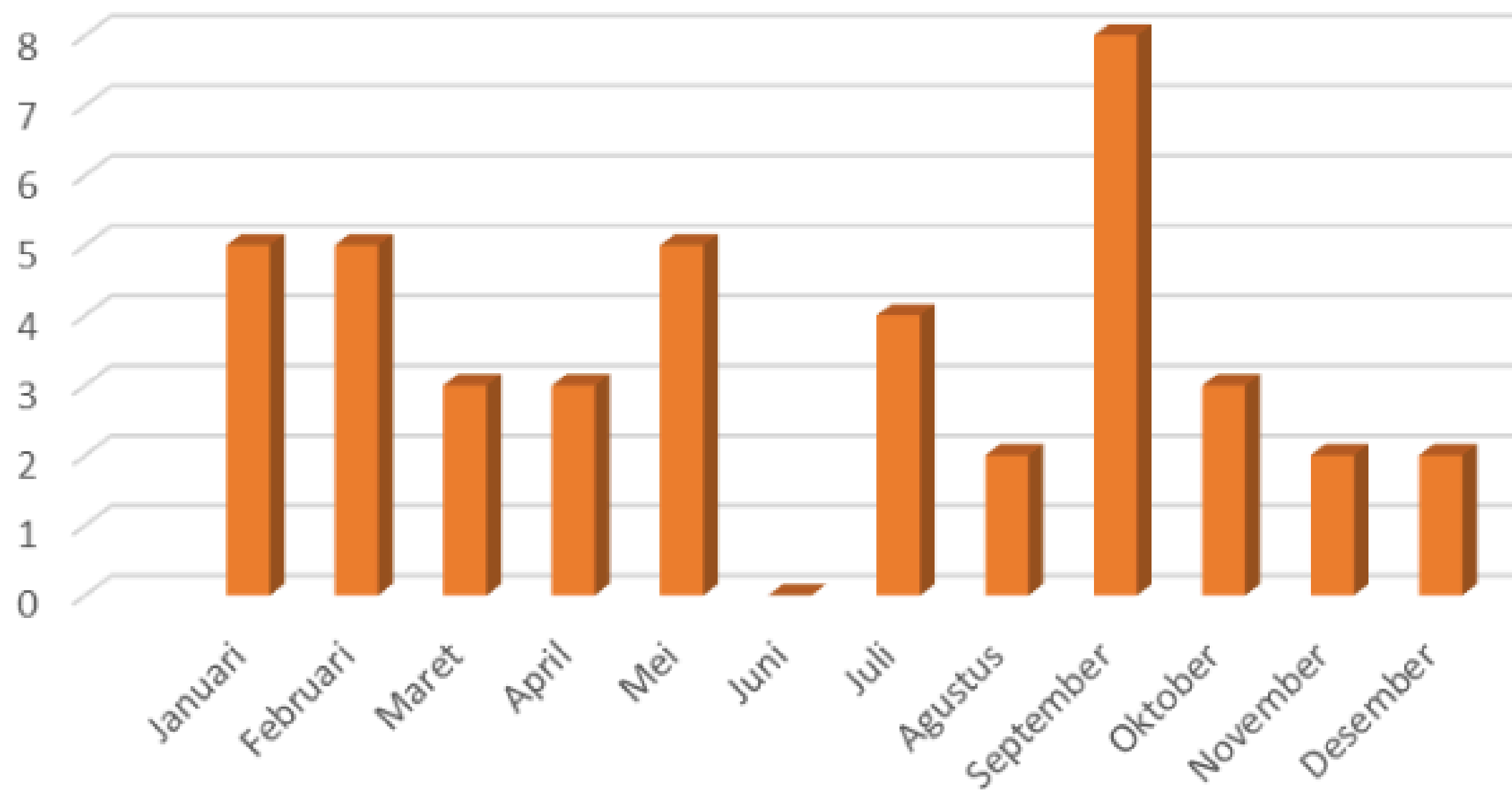




Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik ●

Jumlah Pemohon Informasi



Pelayanan Informasi Publik & Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali telah menerima 42 permohonan pelayanan informasi publik dan 145 pengelolaan pengaduan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Tahun 2023											
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pelayanan Informasi Publik	5	5	3	3	5	0	4	2	8	3	2	2
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	58	65	0	22	0	0

Status Penerimaan

Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2023 telah masuk sebanyak 42 permohonan informasi ke PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali terdapat 42 permohonan informasi yang diterima dan 0 atau nihil permohonan informasi yang ditolak.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

**KODE
FR.04.507**

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN IP

Tanggal Berlaku : 31 Agustus 2020

Revisi : -

Hal. : 1 / 1

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	5	5	√	-	-	0	48	-
2	Februari	5	5	√	-	-	2	0	-
3	Maret	3	3	√	-	-	0	40	-
4	April	3	3	√	-	-	0	30	-
5	Mei	5	5	√	-	-	1	10	-
6	Juni	0	0	√	-	-	0	0	-
7	Juli	4	4	√	-	-	3	0	-
8	Agustus	2	2	√	-	-	1	5	-
9	September	8	8	√	-	-	12	0	-
10	Oktober	3	3	√	-	-	6	0	-
11	November	2	2	√	-	-	4	0	-
12	Desember	2	2	√	-	-	2	0	-

Informasi Publik

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon Informasi publik, maka dari 42 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali sebanyak 42 permohonan informasi publik yang diajukan warga Negara Indonesia.

Jangka Waktu Penyelesaian

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali menerima 42 permohonan Informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3-14 hari kerja.



Poltrada Raih Predikat Informatif Tahun 2023



PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali meraih kembali Penghargaan Predikat Informatif Anugrah Standar Layanan Informasi Publik Tingkat PPID Pelaksana UPT Eselon III di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 dengan nilai 97 (Predikat Informatif). Dibuka secara langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi selaku atasan PPID Kementerian Perhubungan.

Penghargaan diberikan oleh DR Ir Donny Yoesgiantoro MM MPA selaku Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Direktur Poltrada Bali, Dr. Ir Efendhi Pih Raharjo, S.T.S.SiT, selaku PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali.

Semoga Poltrada Bali semakin informatif dan terus meningkatkan pelayanan publik dalam sektor perhubungan

Kesimpulan

Politeknik Transportasi Darat Bali berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan peran dan kinerja Kementerian Perhubungan pada kepentingan publik sehingga mengarah ke clean governance dan good governance

Laporan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim PPID Poltrada Bali mendatang sehingga dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Politeknik Transportasi Darat Bali.